

UNSUR MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Fajri DwiYama¹

Abstract: Islamic education institutions in Indonesia face two challenges, namely; internal and external. Internally, Islamic education is faced with the classic problem of the low quality of human resources in education management. The causes include poor quality and education staff development and selectivity of education personnel. Furthermore externally, Islamic education institutions faced three major issues; globalization, democratization, and liberalization. The issue of globalization that is identical with market orientation and mechanism also affects the world of education. That way in education also includes awareness about how to attract and convince the community of the type and model of education. From here, the education world is ready or not ready to be involved in competition to gain public trust. To face these challenges Islamic Education institutions must maximally manage and empower all elements of management in the management of educational institutions. A good understanding of the elements of management can have an impact on the readiness of educational institutions to manage their institutions well in any condition to be the best and foremost.

Keywords: Elements of Management, Management, Education, Islam

PENDAHULUAN

Menurut bapak Muhammad Hanif Dhakiri yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan pada acara Human Capital Investment di Bali bahwa ada tiga isu utama dalam masalah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, kedua kuantitas dan ketiga adalah persebaran. Menurutnya, hasil pendidikan yang kurang berkualitas, bukan hanya menciptakan pengangguran tetapi juga menyebabkan penurunan standar kerja bagi penyandang pendidikan tinggi pada tataran sarjana. Menurutnya, dari segi kuantitas, rasio jumlah perguruan

¹ Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

tinggi di Indonesia belum dapat menjamin kualitas pendidikan meskipun jumlah rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memiliki penduduk terbanyak di dunia namun memiliki perguruan tinggi yang lebih sedikit dibanding Indonesia.²

Disinilah peranan pendidikan mulai dibutuhkan guna menghasilkan sumber daya manusia yang handal serta berdaya saing tinggi. Pendidikan menjadi ujung tombak untuk menghasilkan sumber daya manusia tersebut. Sebagai mana diungkapkan oleh Sri Minarti bahwa agar mampu berperan dalam persaingan global perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, efisien dalam proses pembangunan.³

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu Pendidikan, diantaranya factor kurikulum, kebijakan Pendidikan, fasilitas Pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar di kelas, di laboratorium, dan di kancha belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan Pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi Pendidikan yang tepat, biaya Pendidikan yang memadai, manajemen Pendidikan yang dilaksanakan secara professional, sumberdaya manusia pelaku Pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman, dan profesional.⁴

²<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-dalam-angkatan-kerja/>

³Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 11

⁴Abdul Hadis, Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 3

Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, factor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu Pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejartera.⁵ Keberadaan pendidik yang profesional juga masih sangat minim di Indonesia. Kebanyakan sekolah-sekolah khususnya di Pendidikan dasar dan menengah diisi oleh pengajar yang berstatus tenaga honorer dimana kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan bidang yang ditekuninya yakni seorang guru, selain itu tidak adanya sistem seleksi yang ketat berakibat pada rendahnya kualitas guru yang kini mendidik dan mengajar generasi penerus berikutnya.

PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur Manajemen

Menurut Malayu S.P Hasibuan unsur-unsur manajemen terdiri dari *men, money, methods, materials, machines, dan market*. Keberadaan unsur-unsur manajemen tersebut jika dikelola dengan baik akan lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.⁶ Kemudian timbul sebuah pertanyaan, siapakah yang mengatur dan mengelola unsur-unsur tersebut agar dapat diimplementasikan pada sebuah organisasi, misalnya lembaga Pendidikan. Jawabannya adalah pimpinan beserta jajarannya dalam hal ini jika yang dibicarakan adalah lembaga Pendidikan, berarti yang mengatur dan mengelola unsur-unsur manajemen yaitu Pimpinan, Pendidik, dan tenaga kependidikan.

Untuk lebih mendalami pemahaman terhadap unsur-unsur manajemen tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Manusia

⁵*Ibid.* h 3

⁶Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, h. 1

Manusia dalam eksistensinya sebagai obyek formal memang sangat beragam. Manusia yang satu berbeda dengan lainnya, baik dalam hal berpikir, tingkah laku, sikap, perasaan, maupun gerak-geriknya. Bentuk keragaman dapat dilihat pada dua anak bersaudara dalam sebuah keluarga. Si A mungkin sangat egois lebih mementingkan dirinya sendiri, sementara saudaranya adalah seorang yang suka membantu orang lain. Keragaman pribadi serta tingkah laku manusia sehingga ia menjadi salah satu unsur yang perlu dikelola dengan baik.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami manusia lebih jauh ialah psikologi. Ahli psikologi berusaha mencari jawaban atas pertanyaan apakah perkembangan manusia itu tergantung pada faktor pembawaan ataukah faktor lingkungan. Dalam hal ini, ada tiga teori yang membahas masalah tersebut yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi.

Menurut aliran nativisme bahwa nasib anak sebagian besar berpusat pada pembawaanya, sementara pengaruh lingkungan hanya sedikit saja. Baik buruknya perkembangan anak sepenuhnya tergantung pada pembawaanya. Pendapat ini dipelopori oleh Schoupenhauwer yang berpendapat bahwa Pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat bawaan.⁷ Pembawaan dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk bertumbuh dan berkembang bagi manusia menurut pola-pola, ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu, yang timbul saat masa konsepsi dan berlaku sepanjang hidup seseorang. Seperti kecenderungan untuk menjadi orang lincah, pendiam, dan sebagainya. Dikatakan sebagai kecendrungan karena pembawaan tersebut akan terjadi seperti apa adanya apabila kondisi memungkinkan.

⁷Baharuddin, *Psikologi Pendidikan: Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, h. 60

b. Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena kebutuhan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.⁸

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikan dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

c. Metode

⁸<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Uang>

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.⁹ Menurut Umar Hamalik jika sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.¹⁰

Metode dalam ilmu manajemen bertumpu pada cara-cara ilmiah dalam menyelesaikan sesuatu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilakukan didasarkan pada keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti cara-cara yang digunakan masuk akal, sehingga dapat diterima oleh nalar manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati dan terukur. Sistematis berarti cara-cara yang dilakukan dalam mengelola memiliki pola sebab akibat dan perencanaan yang logis

d. Material

Material merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem produksi. Tanpa material, produksi tidak mungkin dapat menghasilkan barang jadi atau produk akhir yang diinginkan. Pada sistem produksi, material merupakan masukan atau input yang digunakan untuk diolah menjadi barang jadi. Material yang dimaksudkan disini dapat berupa bahan mentah ataupun bahan yang telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut.

e. Mesin

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode>

¹⁰Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara

Mesin merupakan alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya mesin maka proses produksi atau kegiatan yang terkait dengan tujuan organisasi akan lebih efisien. Istilah mesin biasanya menunjuk kebagian yang bekerja Bersama untuk melakukan kerja. Biasanya alat-alat ini mengurangi intensitas kerja yang dilakukan. Mesin merupakan suatu fasilitas yang mutlak diperlukan perusahaan manufaktur dalam berproduksi. Dengan menggunakan mesin perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas serta dapat mencapai ketepatan waktu dalam menyelesaikan produknya sesuai dengan permintaan pelanggan dan penggunaan bahan baku akan lebih efisien karena dapat lebih terkontrol penggunaannya.

f. Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.¹¹

Dalam ilmu ekonomi arus utama, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa disebut transaksi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang keduanya memengaruhi harga pada barang yang diperdagangkan di pasar tersebut. Berdasarkan wujudnya pasar dibagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Adapun pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan

¹¹[Id.wikipedia.org/wiki/Pasar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar)

kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung, biasanya melalui internet, telepon, dll.¹²

2. Kondisi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia bisa dikatakan sama tuanya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Keberadaan pedagang-pedagang islam yang berasal dari Arab dan India sedikit banyak mempengaruhi peradaban pendidikan di Indonesia. Mereka tidak hanya datang berdagang, namun juga menyebarkan agama Islam dan juga melakukan Pendidikan. Sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad VII Masehi dan berkembang pesat sejak abad XIII Masehi dengan munculnya sejumlah kerajaan Islam, pendidikan Islam berkembang mengikuti perkembangan peradaban kerajaan-kerajaan tersebut.

Namun dalam perkembangannya, lembaga Pendidikan Islam bukanlah tidak menuai hambatan. Munculnya sekolah-sekolah umum negeri yang didirikan oleh pemerintah mengakibatkan dualisme pengelolaan Pendidikan di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pada umumnya dikelola swasta kurang mampu bersaing dengan lembaga Pendidikan umum negeri yang dikelola pemerintah. Pada sebagian tempat satu-persatu lembaga Pendidikan Islam mengalami penyusutan karena tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik serta rendahnya tingkat kepercayaan dan minat masyarakat terhadapnya.

Masalah Pendidikan Islam di Indonesia, secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan yaitu makro dan mikro. Ditingkatan makro, Pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem Pendidikan nasional dan factor-faktor eksternal lainnya. Sementara ditingkatan mikro Pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan tentang proses Pendidikan yang efektif sehingga

¹²*Ibid.*

menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan yang dihadapi pada kedua tingkatan itu pada prinsipnya kemudian mendorong kepada adanya perubahan arah Pendidikan mengingat tantangannya yang berbeda dengan tantangan di masa lalu.¹³

terkait dengan relasi Pendidikan Islam dan sistem Pendidikan nasional, muncul upaya mensintesis kedua dengan salah satunya ditandai terbitnya undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan nasional. Dalam undang-undang itu terdapat penegasan, sistem Pendidikan nasional adalah satu kesatuan dari jalur dan satuan Pendidikan yang beraneka ragam dengan dasar dan tujuan Pendidikan yang bersifat nasional. Meskipun terdapat satu sistem Pendidikan nasional namun di dalamnya yang berbeda-beda.¹⁴ Dengan begitu Pendidikan Islam termasuk bagian dari sistem Pendidikan nasional dimana lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah diakui dalam Pendidikan nasional.

Dalam praktiknya secara umum Pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan peningkatan. Hal ini bias dilihat pada gambaran situasi Pendidikan Islam memasuki tahun 2000 terkait dengan data perkembangan madrasah dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam periode ini terdapat sekitar 31.485 lembaga Pendidikan Islam MI dan MTs serta 3.269 lembaga Pendidikan MA di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Berdasarkan pendataan terhadap 21.454 MI dan MTs serta 3.269 MA di seluruh provinsi di Indonesia, didapatkan partisipasi kasar MI mencapai 2.894.128 siswa, tingkat MTs mencapai 1.813.135 siswa, dan

¹³Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos, Jakarta, 2001, h. 3-4

¹⁴Maksum Mukhtar, *Madrasah, Sejarah & Perkembangannya*, logos, Jakarta, 1999. h.154

tingkat MA tercatat 525.596 siswa. Angka menunjukkan sumbangan lembaga Pendidikan madrasah terhadap mobilisasi Pendidikan nasional mencapai 10.1% dari sekitar 27.454.659 anak usia 13-15 tahun, dan 4% dari seluruh remaja usia 16-18 tahun ditahun 1999-2000. Ini berarti peningkatan sekitar 1,8% untuk level MI dan 3,9% pada tingkatan MTs.¹⁵

Gambaran kondisi lembaga Pendidikan Islam di atas menunjukkan penyelenggaraan Pendidikan Islam telah mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Namun keadaan tersebut tidak serta merta dapat menghapus stigma yang ada pada sebagian besar masyarakat mengenai lembaga Pendidikan Islam. Pandangan lama yang menilai madrasah dan pesantren sebagai institusi Pendidikan pilihan kedua atau kelas dua setelah lembaga Pendidikan umum.

Mujamil Qomar menyatakan, istilah kelas dua yang ditujukan terhadap lembaga Pendidikan Islam itu tidak hanya mencerminkan penilaian obyektif-empirik saja, namun juga merupakan suatu pelecehan. Jika stigma itu masih melekat, hal ini tentu berdampak kurang baik terhadap perkembangan dan masa depan lembaga Pendidikan Islam. Bagi qomar, stigma ini tidak perlu direspon secara reaktif karena mungkin saja hal itu mencerminkan kebenaran substansi Pendidikan Islam. Secara garis besarnya, sudah mendesak bagi lembaga-lembaga Pendidikan Islam untuk melakukan perubahan strategi konvensional menjadi strategi-strategi transformative. Dalam strategi transformative akan bias diberdayakan semua potensi menjadi kekuatan yang andal guna mengawal, mengantarkan, dan mewujudkan keberhasilan serta kemajuan suatu lembaga Pendidikan Islam baik secara fisik dan kualitasnya.¹⁶

¹⁵Abudin Nata, *Kapita selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 2003, h. 100-101

¹⁶Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2013. h. xviii

Dalam perspektif ke depannya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia menghadapi dua tantangan yaitu; internal dan eksternal. Secara internal, pendidikan Islam dihadapkan ada persoalan klasik berupa rendahnya kualitas SDM pengelola pendidikan. Penyebabnya di antaranya lemahnya kualitas dan pembinaan tenaga kependidikan serta selektivitas tenaga kependidikan. Namun sekarang ini situasinya mulai menunjukkan trend positif dalam pembinaan dan rekrutmen tenaga kependidikan. Selanjutnya secara eksternal, lembaga pendidikan Islam dihadapkan tiga isu besar; globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi. Isu globalisasi yang identik dengan orientasi dan mekanisme pasar juga mempengaruhi dunia pendidikan. Dengan begitu dalam pendidikan juga menyertakan kesadaran tentang cara menarik dan meyakinkan masyarakat terhadap jenis dan model pendidikan. Dari sini, dunia pendidikan siap atau tidak siap harus terlibat persaingan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Di masa lalu, persaingan antara lembaga pendidikan itu berlaku pada lembaga-lembaga swasta saja. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan, beberapa sekolah negeri juga mengalami situasi yang hampir sama, ikut terlibat ke dalam persaingan. Seperti halnya logika hukum pasar, keberhasilan lembaga pendidikan dalam persaingan berarti menjamin keberadaan dan keberlangsungan lembaga pendidikan bersangkutan. Madrasah/sekolah yang berhasil menunjukkan dan menawarkan hal yang dinilai berkualitas akan diminati masyarakat. Sebaliknya, madrasah/sekolah yang kurang berhasil atau gagal akan memperoleh siswa dalam jumlah minim.

Seperti telah diuraikan, sejak periode 1999/2000 terjadi peningkatan mobilisasi pendidikan oleh lembaga pendidikan Islam. Namun keadaan ini juga diikuti meningkatnya jumlah madrasah/sekolah Islam. Hal ini yang

makin meramaikan persaingan antar lembaga pendidikan dalam upaya menarik minat masyarakat. Secara umum tantangan dan beban persaingan yang dihadapi juga kompleks; sebelumnya mereka berhadapan dengan lembaga/sekolah umum, kini antar lembaga pendidikan Islam pun harus saling bersaing. Kini madrasah/sekolah Islam menghadapi tantangan berat terkait dengan tiga isu besar (globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi) karena semakin sengitnya persaingan. Tiga hal itu telah membuat pendidikan Islam berada di persimpangan; mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru.

3. Unsur Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Menatap arah pengembangan lembaga Pendidikan Islam di masa ini yang dipenuhi dengan persaingan, mau tidak mau dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi persaingan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian penting setiap lembaga Pendidikan ialah bersaing dalam hal penerapan maupun penggunaan manajemen yang tepat. Adanya manajemen yang berdaya guna dalam lembaga Pendidikan maka pekerjaan pengelolaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Memahami dan melakukan pengelolaan secara maksimal kepada unsur-unsur manajemen yang terdapat pada lembaga Pendidikan islam memungkinkan lembaga tersebut menjadi terbaik dan terdepan dalam persaingan Pendidikan di dunia. Unsur-unsur tersebut berupa *men, money, methods, materials, machines, and market*. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja pelaksana berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berkaitan dengan manajemen permodalan atau pembelanjaan. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha

mencapai tujuan. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan berkaitan dengan manajemen akuntansi biaya. *Machines* yaitu alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan berkaitan dengan manajemen produksi. *Market* yaitu unsur pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan berkaitan dengan manajemen pemasaran.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur manajemen tersebut membentuk bidang-bidang manajemen tertentu seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen permodalan, manajemen keuangan, manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Adapun beberapa bidang-bidang manajemen yang dapat diaplikasikan pada lembaga Pendidikan Islam untuk mendorong peningkatan lembaga tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Lembaga Pendidikan memiliki berbagai macam sumber daya yang digunakan untuk proses Pendidikan. Diantara sumber daya yang dimiliki oleh lembaga Pendidikan, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, staffing, penilaian

¹⁷Malayu S.P Hasibuan, *Op.cit.*, h.20-21

kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektifitas hubungan kerja.¹⁸

Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia secara efektif, lembaga Pendidikan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Pemaha tentang hal ini membutuhkan apresiasi terhadap perubahan kondisi dan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan dampak kejadian dimasa yang akan datang, misalnya perekrutan tenaga kependidikan harus memperhatikan kesesuaian latar belakang Pendidikan, dan kompetensi terhadap penempatannya pada lembaga.

Pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga Pendidikan harus menjadi perhatian khusus bagi pemimpin lembaga Pendidikan. Sumber daya manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan organisasi. Untuk itu kunci dasar mempertahankan keberlangsungan organisasi bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada organisasi atau lembaga Pendidikan. Mengelola manusia tidak semuda mengelola benda mati yang dapat diletakkan, diatur sedemikian rupa sesuai kehendak pimpinan. Manusia perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya dengan berbagai cara supaya masing-masing individu tersebut mau dan mampu melaksanakan pekerjaan, aturan dan perintah yang ada dalam organisasi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan lembaga.

b. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan semua substansi manajemen Pendidikan di sekolah. Biaya Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan. Tidak

¹⁸Priyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Zifatama Publisher, 2010, h. 18

ada kegiatan Pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya, proses Pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Untuk itu manajemen keuangan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Untuk itu setiap pengelola lembaga Pendidikan diharuskan memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan seefisien serta seefektif mungkin.

Fungsi keuangan dalam banyak organisasi berperan sebagai unit penunjang.¹⁹ Dalam organisasi sekolah, fungsi uang atau dana diantaranya sebagai penunjang lancarnya kegiatan utama, yaitu melakukan proses Pendidikan dan pengajaran. Fungsi yang demikian tersebut tidak berlebihan sebab setiap aktifitas dalam organisasi umum atau organisasi Pendidikan berhubungan dengan keuangan. terlebih dalam era persaingan sekarang ini, perubahan dan inovasi menjadi suatu tuntutan. maka, bisa dimengerti jika fungsi manajemen keuangan menjadi begitu penting.

Secara garis besar, standar pembiayaan sekolah mencakup beberapa di dalam pengelolaan lembaga Pendidikan. Hal-hal tersebut terdiri dari pembiayaan Pendidikan, biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi satuan Pendidikan. Pembiayaan Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan Pendidikan meliputi gaji pendidik dan

¹⁹Marno, Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditma, 2008, h. 77

tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi Pendidikan tak langsung.²⁰

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dapat berjalan lancar jika pengelolaan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya.

c. Produksi

Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual. Jika dikaitkan dengan lembaga Pendidikan produksi yang dimaksudkan adalah produksi jasa yang diberikan oleh lembaga Pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jasa tersebut berupa layanan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Produksi pada lembaga Pendidikan bukanlah memproduksi peserta didik namun lebih kepada memproduksi jasa Pendidikan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh peserta didik. Posisi peserta didik atau murid dalam manajemen produksi adalah sebagai pengguna produk lembaga Pendidikan.

Jasa Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga Pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa Pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara simultan pada waktu yang sama. Jika

²⁰E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 42

peserta didik membeli jasa Pendidikan maka akan berhadapan langsung dengan penyedia jasa Pendidikan. Oleh karena itu, lembaga Pendidikan dapat menggunakan strategi bekerja dalam kelompok lebih besar, bekerja lebih cepat, atau melatih penyaji jasa agar mereka mampu membina kepercayaan pelanggannya (peserta didik).

Dalam jasa Pendidikan, produk yang ditawarkan kepada peserta didik ialah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Sekolah yang baik menawarkan reputasi atau mutu Pendidikan yang tinggi, prospek bagi peserta didik setelah lulus, dan pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi sehingga calon peserta didik dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka.

d. Pemasaran

Ketika melihat lembaga Pendidikan dari kacamata sebuah *corporate*, lembaga Pendidikan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa Pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa Pendidikan, disebabkan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, produksi jasa yang ditawarkan tidak berlaku. Artinya, lembaga Pendidikan yang memproses jasa Pendidikan tidak mampu memuaskan *users educations* sesuai dengan permintaan pasar, bahkan lembaga Pendidikan tersebut tidak akan berlaku untuk terus eksis.

Berbeda dengan produk fisik, jasa pelayanan Pendidikan tidak dapat disimpan. Ia diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Dampaknya terjadi pada sistem pemasaran, terutama pada sisi permintaan. Jika permintaan stabil, akan memudahkan penyedia jasa Pendidikan untuk melakukan persiapan, baik dari sarana prasarana maupun peralatan teknologi Pendidikan lainnya. Akan tetapi, jika permintaan fluktuatif, lebih sulit bagi

penyedia jasa Pendidikan untuk melakukan strategi pemasaran. Jasa Pendidikan tidak bias dilihat dan dirasakan oleh konsumen sebelum konsumen membeli atau mendapatkan penyedia jasa Pendidikan secara langsung. Konsumen juga tidak bias memprediksi hasil yang akan diperoleh dengan mengonsumsi jasa Pendidikan kecuali setelah membelinya.

Karena tidak berwujud, konsumen biasanya melihat tanda-tanda dari sesuatu yang bias dilihat atau dirasakan untuk bias menilai kualitas suatu jasa Pendidikan. Mereka akan melihat kualitas kinerja guru, tata usaha, karyawan sekolah, sarana prasarana sekolah, peralatan Pendidikan sekolah, symbol-simbol yang digunakan sekolah, dan juga harga yang bisa mereka bayar pada sekolah. Untuk itu, komponen lembaga Pendidikan harus terus melakukan pengembangan pada sisi kompetensi dan kualitasnya.

Pengelolaan jasa Pendidikan biasanya sulit untuk membuat standar kualitas jasa Pendidikan. Hal ini disebabkan karena masing-masing mempunyai standar proses bergantung pada kualitas proses internal penyedia jasa Pendidikan. Walaupun demikian, sudah seharusnya sebuah lembaga Pendidikan membuat standar layanan agar kualitas jasanya lebih mudah dikontrol, yang kemudian bias dijadikan sebagai komoditas pasar.

Konsep pemasaran Pendidikan memiliki tiga dasar, yaitu 1) dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan bisnis. 2) mengembangkan pendekatan organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 3) mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memberikan kepuasan kepada konsumen.²¹ Jadi dalam pemasaran Pendidikan dapat diartikan sebagai memuaskan konsumen Pendidikan. Dengan demikian lembaga Pendidikan ialah lembaga yang bergerak

²¹David W. Cravens, *Strategic Marketing*, Jakarta: Erlangga, 1996, h.23

dibidang layanan jasa Pendidikan yang kegiatannya melayani konsumen berupa murid, siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengelolaan lembaga Pendidikan Islam di Indonesia serta unsur-unsur manajemen yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum tantangan dan beban persaingan yang dihadapi lembaga Pendidikan Islam menjadi kompleks. Sebelumnya mereka berhadapan dengan lembaga/sekolah umum, kini antar lembaga pendidikan Islam pun harus saling bersaing. Kini madrasah/sekolah Islam menghadapi tantangan berat terkait dengan tiga isu besar (globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi) karena semakin sengitnya persaingan. Tiga hal itu telah membuat pendidikan Islam berada di persimpangan; mempertahankan tradisi lama atau mengadopsi perkembangan baru.
2. Lembaga Pendidikan Islam harus tampil sebagai lembaga Pendidikan yang terdepan dalam persaingan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengikuti perkembangan yang ada melalui pemanfaatan unsur-unsur manajemen untuk pengelolaan lembaga Pendidikan Islam.
3. Pengelolaan lembaga Pendidikan Islam harus fokus kepada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, produksi jasa, dan pemasaran. Hal-hal tersebut merupakan pengembangan dari unsur-unsur manajemen untuk pengelolaan lembaga Pendidikan Islam lebih baik, maju, serta berdaya saing tinggi.

Daftar Rujukan

- Abudin Nata, *Kapita selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 2003
- Abdul Hadis, Nurhayati B, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Baharuddin, *Psikologi Pendidikan: Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- David W. Cravens, *Strategic Marketing*, Jakarta: Erlangga, 1996
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukkseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidkan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Uang>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tiga-isu-utama-sdm-indonesia-dalam-angkatan-kerja/>
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Logos, Jakarta, 2001
- Maksum Mukhtar, *Madrasah, Sejarah & Perkembangannya*, logos, Jakarta, 1999
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajamen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Marno, Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditma, 2008
- Priyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Zifatama Publisher, 2010

Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016